

EKSISTENSI PEREMPUAN BULELENG DIKANCAH POLITIK LOKAL SUATU PERJUANGAN MENUJU KESETARAAN GENDER

Oleh I Nyoman Suprpta¹

Abstraksi

Ideologi gender yang berupa gagasan atau kepercayaan yang menggariskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran berbeda, ditambah lagi dengan adanya ideologi patriarki, yang menekankan apa anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, pada akhirnya sangat merugikan posisi perempuan dalam kehidupan di masyarakat. Terlebih di bidang politik yang memang seolah-olah hanya cocok untuk kaum laki-laki. Dengan adanya globalisasi dan tuntutan emansipasi wanita, kaum perempuan berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka sanggup melakukan bidang pekerjaan yang selama ini hanya dikuasai laki-laki, termasuk terjun di panggung politik. Luh Tiwik Ismarheningrum dan Luh Kertianing adalah dua orang tokoh wanita Buleleng yang saat ini ikut meramaikan dan menyemarakkan panggung politik di Buleleng. Kehadiran mereka seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kaum perempuan juga bisa sukses di panggung politik. Kehadiran mereka di panggung politik juga sebagai suatu perjuangan untuk menuju kesetaraan gender, menuju kesejajaran antara perempuan dan laki-laki.

Kata kunci : *perempuan, gender, politik, laki-laki.*

¹Staf Pengajar Universitas Panji Sakti

1. Pendahuluan

Ucapan para pejabat, agamawan, budayawan maupun politikus atau yang umum biasa disebut juru moral acap kali menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara tidak ada yang meminggirkan dan dipinggirkan, tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Untuk menunjukkan bahwa gagasan mereka benar, mereka sering menyitir teks suci agama. Dalam konteks agama Islam misalnya, bisa dilihat kajian Baidan (2009), Stowasser (2011), Siddiqui (2012), Kajtasungkana (2007). Sedangkan untuk agama Hindu bisa dicermati misalnya kajian Titib (2008).

Gagasan mereka secara tekstual sangat menyejukkan, namun belum tentu berkontekstual. Atau meminjam gagasan Hardiman (2013) teks kognisi yang indah, belum tentu sama dengan teks sosial, bahkan bisa bertolak belakang (Siddiqui,2012 ; Kajtasungkana, 2007). Perempuan tetap saja mengalami marginalisasi "...berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggiran. Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani,

sehingga tidak pantas atau tidak dapat menjadi pemimpin. Akibatnya, wanita selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan memimpin “(Murniati,2004).

Khusus di bidang politik, marginalisasi terhadap kaum perempuan pada akhirnya sangat merugikan dan sangat melemahkan posisi kaum perempuan itu sendiri. Terlebih dengan adanya anggapan yang masih sangat kental sampai saat ini bahwa dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya “image” yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah wanita yang terjun di dunia politik relatif kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasinya dan persamaan hak asasinya cukup tinggi. Selain itu, kesan semacam itu muncul karena secara historis khususnya pada tahap awal perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan “lembaga” atau aktivitas kerja di luar rumah; sementara perempuan bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami.

Munculnya ideologi gender dan patriarki secara kultur lebih memosisikan kaum perempuan sebagai kaum nomor dua setelah kaum laki-laki.

Ideologi gender merupakan pola berpikir yang membedakan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kepantasannya. Dengan kata lain, melalui ideologi gender manusia menciptakan kotak untuk perempuan dan kotak untuk laki-laki sesuai dengan yang diperoleh dari pengalamannya. Ideologi ini mendesain pikiran, ingatan, sehingga manusia hafal apa yang harus dicatat, apa yang harus diperhatikan, dan apa yang harus diingat tentang perempuan dan laki-laki. Ciri perempuan dan laki-laki dikunci mati oleh ideologi gender (Murniati, 2004).

Jadi, ideologi gender adalah gagasan maupun kepercayaan yang menggariskan bahwa pria dan wanita memiliki peran berbeda, yakni peran gender yang dibakukan dalam pikiran, ucapan, dan perilaku sosial, dan dibentuk secara sosiobudaya.

Selain ideologi gender, ada pula ideologi patriarki yang menekankan, bahwa “...laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki” (Bhasin,2006).

Begitu pula pada kesempatan lain Bhasin (2010) menjelaskan bahwa :

“Patriarki adalah sebuah struktur sosial dan sebuah ideologi atau sistem kepercayaan, di mana laki-laki memiliki superioritas. Agama telah memainkan peranan yang penting di dalam menciptakan dan mengabadikan ideologi patriarki. Mereka telah menyebar konsep-konsep mengenai superioritas laki-laki melalui cerita (Bhasin, 2010 : 27).

Sedangkan, Adian (2006) menyatakan bahwa ideologi patriarki adalah suatu ide yang menempatkan pria pada posisi dominan dan wanita pada posisi subordinat. Dominasi laki-laki atas wanita, tidak saja dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga secara seksual sehingga melahirkan ideologi seks.

Pemberlakuan ideologi patriarki mengakibatkan pria memiliki superioritas terhadap wanita. Laki-laki ditempatkan sebagai satu-satunya manusia berjenis kelamin tangguh dan diakui sepanjang jaman sebagai representasi Tuhan, mengatur, melarang, menentukan, memutuskan dan memerintah segalanya. (Amirudin dalam Sugiarta, 2006 : 3). Gagasan ini memberikan pula penggambaran bahwa identitas perempuan adalah jenis kelamin kedua. Hal ini dipertegas dengan adanya pengaturan hak waris terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam budaya Jawa dikenal sistem pembagian warisan dengan pola “sapikul sagendongan” yang artinya laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dan perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian. Bahkan dalam budaya Bali, perempuan tidak mendapatkan hak sama sekali dalam pembagian warisan. Hak waris sepenuhnya dikuasai oleh kaum laki-laki.

Namun, seiring dengan perkembangan jaman, tingkat modernisasi dan globalisasi, saat ini kaum perempuan sudah mulai berhasil memperjuangkan posisinya untuk bisa setara dengan kaum laki-laki dalam segala bidang kehidupan. Gerakan emansipasi wanita dan tuntutan kesetaraan gender mengilhami perjuangan kaum perempuan tersebut. Mereka tidak lagi mau disebut sebagai kaum nomor dua, mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Bahkan, pekerjaan yang sepuluh atau dua puluh tahun lalu hanya pantas dilakukan oleh laki-laki, saat ini pekerjaan tersebut sudah biasa dilakukan oleh para wanita, termasuk pada pekerjaan kasar sekalipun.

Walaupun sudah terlibat ke sektor-sektor publik, namun jumlahnya masih relatif kecil. Hal ini sangat kontras dengan prosentase jumlah penduduk wanita Indonesia yang mencapai setengah lebih dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Dengan demikian, di satu sisi terlibatnya wanita dalam berbagai sektor publik merupakan suatu hal yang menggembirakan, namun rendahnya kuantitas wanita dalam sektor-sektor tersebut sungguh merupakan hal yang patut mendapat perhatian.

Diantara sektor-sektor publik yang telah dimasuki wanita, sektor politik merupakan hal yang sangat menarik sekaligus sangat penting. Menarik karena secara historis memang sangat sedikit terlihat keterlibatan perempuan dalam sektor ini. Ini juga sangat penting karena sesungguhnya keterlibatan perempuan dalam sektor politik dapat berpengaruh sangat besar pada kebijakan yang diambil, khususnya dalam kaitan dengan peran perempuan secara menyeluruh. Dengan demikian output kebijakan lebih ramah pada perempuan (Sandiasa, 2012: 73). Hal ini dapat terjadi karena suara-suara perempuan akan lebih nyaring terdengar bila disuarakan oleh, misalnya anggota parlemen. Kesan bahwa politik itu kejam, kotor, penuh intrik, dan sebagainya akan menjadi lebih halus, sejuk dan lebih nyaman bila di dalamnya terlibat banyak kaum perempuan. Perempuan diharapkan akan mampu menjadikan panggung politik menjadi sebuah taman yang indah, yang penuh dengan aneka bunga warna warni yang harum semerbak. Dan keterlibatan wanita dalam panggung politik ini juga diharapkan akan bisa dijadikan sebagai suatu perjuangan menuju adanya kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam segala bidang kehidupan.

2. Perempuan Buleleng di Panggung Politik Lokal

Berbicara tentang keterlibatan atau partisipasi politik kaum perempuan, tentu saja kita tidak dapat menghindarkan diri dari diskusi tentang partisipasi politik menurut disiplin ilmu politik. Menurut Verba, Nie, dan Kim, (dalam Afan Gafar, 1991) partisipasi politik adalah *“legal activities by private citizens that are more or less directly aimed at influence the selection of governmental personal and/or the actions they take”*. Mely G. Tan (dalam Yulfita, 1995) membedakan

partisipasi politik dalam dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas, berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang mendasar yang menyangkut kehidupan orang banyak.

Keterlibatan perempuan untuk terjun di panggung politik di dasarkan atas beberapa faktor pendorong. Diantaranya adalah adanya kesadaran akan hak politik sebagai warga negara, untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan organisasi politik. Kesadaran akan hak politik itu juga diperkuat oleh kenyataan akan kurang terwakilinya perempuan dalam panggung politik dan kurang terdengarnya gaung suara perempuan atau yang menyuarakan perempuan di berbagai arena politik. Kenyataan semacam itu tentu suatu hal yang sangat ironi, kalau dikaitkan dengan program pemerintah yang selalu berbicara tentang kesederajatan, kesetaraan, bias gender, kemitra sejajaran. Dalam hubungan dengan hal inilah masalah pemberdayaan perempuan atau bagaimana perempuan diletakkan dalam kehidupan bernegara kembali penting untuk terus dikemukakan, lebih-lebih kita sedang berada di titik simpang yang dapat membawa posisi perempuan ke dua arah yang berlawanan.

Kenyataan lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kenyataan di akar rumput basis pemilih perempuan cukup tinggi bahkan berada di atas jumlah pemilih laki-laki. Basis perempuan di akar rumput seperti itu, selama ini belum diberdayakan secara optimal untuk berpartisipasi secara aktif dalam panggung politik, baik dalam pengertian konvensional seperti pemberian suara, diskusi politik, membentuk dan tergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif, maupun yang non konvensional, seperti petisi, demonstrasi, mogok, dll. (Gabriel Almond dalam Mochtar Masoed, 2008). Kurangnya pemberdayaan politik perempuan secara optimal merupakan suatu fenomena yang akan memberikan sumbangan yang berarti bagi rendahnya partisipasi politik perempuan. Rendahnya partisipasi politik perempuan merupakan suatu kondisi yang akan menyebabkan terbatasnya

keterwakilan perempuan baik dalam tataran partai politik maupun pada tataran anggota dewan. Hal ini disadari baik oleh tokoh politik perempuan maupun tokoh politik dari kalangan laki-laki. Masalahnya bukan semata diberdayakan atau tidak, yang lebih penting mengapa upaya pemberdayaan perempuan belum dilakukan secara optimal. Apakah hal itu merupakan keteledoran politik atau kesengajaan politik. Bila hal itu suatu keteledoran politik tampaknya itu masih dapat dimaklumi, karena tokoh-tokoh partai politik tidak jarang masih dihadapkan pada masalah internal partai, konsolidasi ke dalam dan kesibukan dalam memposisikan dirinya masing-masing. Akan tetapi bila hal itu merupakan suatu kesengajaan politik maka hal itu sangat disayangkan. Karena itu berarti ada upaya yang sistematis untuk tetap membelenggu dan mendominasi kaum perempuan. Perilaku politik semacam itu tentu tidak saja merugikan kaum perempuan, tetapi juga merugikan alam demokrasi, masyarakat, bangsa dan negara. Karena potensi sumber daya politik belum dimanfaatkan secara optimal sehingga mesin politik belum bekerja sesuai dengan yang diharapkan bersama, sebagai warga masyarakat yang menjunjung tinggi demokrasi.

Kondisi semacam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi tokoh-tokoh perempuan untuk memfasilitasinya. Karena bila seluruh kaum perempuan dapat diberdayakan tentu akan memberikan sumbangan yang berarti bagi semakin kuatnya posisi perempuan di panggung politik. Sehingga kaum perempuan tidak hanya sebagai objek politik tetapi juga subjek politik, dan juga memiliki nilai tawar yang lebih kuat.

Faktor pendorong yang lain adalah adanya keinginan untuk mengabdikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di panggung politik. Diantara tokoh-tokoh politik yang aktif pada tataran politik tingkat atas, umumnya memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang cukup memadai. Latar belakang ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk terjun di panggung politik di jaman sekarang ini, karena jaman sekarang adalah jaman duit, sehingga manusia patuh pada daulat uang dan daulat pasar. Berkenaan dengan itu maka modal ekonomi sangat menentukan kehidupan manusia (Atmaja,2006). Dari latar belakang pendidikan, rata-rata yang duduk ditataran atas adalah kaum perempuan yang

sudah tamat dari lembaga pendidikan tinggi. Luh Hesti Ranitasari, SE., MM, Politisi Partai Demokrat Buleleng merupakan salah satu contoh perempuan Buleleng yang terjun di panggung politik yang memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang memadai. Dia adalah seorang pengusaha yang secara ekonomi cukup mapan. Pendidikan terakhirnya adalah pasca sarjana (S2).

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kenyataan bahwa banyak kaum perempuan mampu menjadi pemimpin. Untuk tataran internasional ada nama-nama seperti Margareth Teacher (Inggris), Indira Gandhi (India), Benasir Bhutto (Pakistan), Corazon Aquino dan Gloria Macapagal Arroyo (Filipina), sampai kepada Megawati Soekarnoputri, serta Puan Maharani (Ketua DPR-RI) yang berhasil menduduki posisi puncak baik di partai politik maupun dalam struktur kelembagaan negara. Untuk tataran yang lebih rendah ada nama-nama Kofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), Faida (Bupati Jember), Ade Munawaroh Yasin (Bupati Bogor), I Gusti Ayu Mas Sumantri (Bupati Karangasem) dan banyak lagi nama-nama tokoh politik perempuan yang mampu menjadikan dirinya sebagai pemimpin, bahkan dalam proses pemilihannya mengalahkan kaum laki-laki. Berdasarkan hasil Pilkada serentak tahun 2018, 14 perempuan berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk kaum perempuan Buleleng, dalam dekade sepuluh tahun terakhir tampaknya mulai semakin berkembang perannya di panggung politik. Kaum perempuan yang memasuki panggung politik pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai paling tidak tamat SMA/SMK, bahkan mereka yang menduduki struktur kepengurusan partai semuanya memiliki latar belakang pendidikan lulusan Perguruan Tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa para wanita yang terlibat dalam politik formal memiliki potensi sumber daya manusia cukup memadai, dan memiliki dasar akademik yang kuat, serta tentu juga memiliki daya analisis kritis yang cukup baik. Hal ini misalnya dapat disimak dari sikap mereka terhadap perbedaan pendapat, mereka umumnya sangat menghargai adanya perbedaan pendapat yang didasarkan atas pemikiran yang jernih, sehat dan argumentasi yang kuat. Persepsi semacam itu tentu akan menjadi kekuatan yang cukup berarti dalam membangun kehidupan demokrasi yang lebih sehat.

Demikian pula orientasi ideologi mereka memiliki orientasi ideologi yang berpihak pada kepentingan umum dan sangat aspiratif terhadap masalah kemiskinan, kesempatan kerja, moral, dan lingkungan.

Nama-nama seperti Ni Luh Hesti Ranitasari, Luh Gede Herayanti, Kadek Turkini, Tutik Kusumawardani, Luh Sri Seniwi dan Gusti Ayu Aries Sujati bisa dikedepankan sebagai berhasilnya kaum perempuan Buleleng di panggung politik lokal. Saat ini Luh Gede Herayanti yang biasa dipanggil Luh Gede adalah Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Buleleng. Dia adalah satu-satunya perempuan yang saat ini menjadi pemimpin sebuah partai politik besar di Kabupaten Buleleng bahkan di Bali. Satu lagi nama perempuan yang tidak bisa dilepaskan dari hingar bingar panggung politik Buleleng adalah Tutik Kusumawardani. Beliau adalah politisi Partai Demokrat yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Propinsi Bali, DPR-RI, dan pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Buleleng pada Pilkada 2017, bertarung dengan calon petahana Putu Agus Suradnyana.

Beberapa tahun yang lalu pernah ada nama Luh Tiwik Ismarheningrum, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng. Munculnya Mbak Tiwik sebagai Ketua DPD Partai Golkar Buleleng pada awalnya cukup mengejutkan, karena sebelumnya dia hanya dikenal sebagai seorang wanita pengusaha. Akan tetapi setelah kurang lebih 3(tiga) tahun beliau memimpin Partai Golkar Buleleng, Mbak Tiwik mampu memberikan warna lain dalam kehidupan politik di Buleleng. Tidak jarang kehadirannya di tengah-tengah massa maupun di dalam forum-forum yang melibatkan tokoh-tokoh partai politik, LSM, serta tokoh-tokoh masyarakat (seperti dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi antar Partai Politik Buleleng), mampu memberikan suasana yang sejuk, harmonis, penuh canda dan keramah tamahan. Dalam setiap kesempatan beliau selalu ingin menonjolkan dan menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di panggung politik bukanlah hal yang tabu, akan tetapi justru kehadiran perempuan akan mampu merubah image politik dari sesuatu yang kejam, kotor, penuh intrik, menjadi sesuatu yang penuh dengan keharmonisan, kesejukan, persaudaraan, dan keramah tamahan.

Nama selanjutnya yang saat ini mampu menjadikan dirinya diperhitungkan di panggung politik Buleleng adalah Luh Hesti Ranitasari. Saat ini beliau duduk sebagai anggota DPRD Buleleng. Beliau juga duduk sebagai Ketua Komisi IV di DPRD Buleleng, yang membidangi masalah Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Kependudukan, atau hal-hal yang berhubungan dengan Kesejahteraan Rakyat. Beliau adalah satu-satunya perempuan yang menduduki posisi sebagai Ketua Komisi (di DPRD Buleleng saat ini ada 7 orang perempuan, yakni : Luh Hesti Ranitasari, Luh Sri Seniwi, Ni Luh Sri Sami, Luh Marleni, Ni Made Lilik Nurmiasih, Ni Kadek Turkini, dan Ni Ketut Windrawati). Seorang perempuan Buleleng yang bernama Gusti Ayu Aries Sudjati, yang merupakan istri dari Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, saat ini duduk sebagai anggota DPRD Propinsi Bali periode 2019 – 2024.

Tampilnya tokoh - tokoh perempuan Buleleng tersebut di panggung politik Buleleng, memang diharapkan mampu membawa suasana yang lebih beragam serta mampu sebagai penyejuk kehidupan politik di Buleleng. Kehadiran dan keberhasilan kedua tokoh wanita tersebut, di samping karena kemampuan berpolitiknya, juga didukung oleh keterampilannya dalam berkomunikasi sehingga diterima oleh berbagai pihak. Juga karena mereka didukung oleh keluarga, kerabat, anggota masyarakat, dan teman-teman seperjuangan. Kita tetap berharap kedepan akan lahir dan muncul srikandi-srikandi baru di panggung politik Buleleng yang akan menjadikan suasana politik di Buleleng menjadi lebih semarak dan tentunya lebih menyejukan, sehingga image bahwa politik itu adalah sesuatu yang kejam, kotor, penuh intrik, keras dan hanya cocok untuk kaum laki-laki sedikit demi sedikit bisa direduksi.

3. Perjuangan menuju Kesetaraan Gender

Keterlibatan perempuan di panggung politik memang harus diakui belum begitu banyak. Hal ini mungkin karena adanya klasifikasi pekerjaan berdasarkan seksual, yang cenderung memposisikan perempuan pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat domestik, halus, dan ringan. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan sektor publik, keras, berat, dan kasar adalah pekerjaan kaum laki-laki. Klasifikasi

pekerjaan semacam itu pada dasarnya merupakan klasifikasi yang diwarnai oleh dominasi budaya patriarki. Patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau patriarch. Mulanya patriarki digunakan untuk menyebut suatu jenis keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. Kenyataan tersebut lebih lanjut berimplikasi pada jabatan-jabatan yang dipegang oleh tokoh-tokoh perempuan yang aktif di panggung politik. Hampir semua lembaga politik dalam masyarakat, di semua tingkat didominasi laki-laki, dari dewan desa sampai parlemen. Hanya ada segelintir perempuan di organisasi partai politik. Ketika perempuan mendapatkan kedudukan politik yang penting, pada awalnya karena hubungan mereka dengan laki-laki yang pribadi politiknya kuat, dan mereka berfungsi di dalam struktur-struktur dan asas-asas yang dibuat oleh laki-laki. Kondisi itu menunjukkan adanya semacam kontrol laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kontrol laki-laki semacam itu tentu akan sangat menguntungkan kaum laki-laki di satu pihak dan sangat merugikan kaum perempuan dan masyarakat di pihak lain.

Budaya atau ideologi patriarki merupakan kendala besar bagi wanita untuk melepaskan diri dari marginalisasi. Hal ini tidak hanya karena modal ekonomi wanita sengaja dibatasi, tetapi sebagaimana yang berlaku pada masyarakat Bali, pemarginalan diperkuat pula dengan pengidealan patokan umur pasangan yang akan menikah, yakni suami harus lebih tua daripada istri. Begitu pula suami diharapkan berijazah lebih tinggi daripada istrinya, karena ijazah bisa dialihkan menjadi modal ekonomi, dan terkait pula dengan modal kekuasaan, mengingat gagasan Foucault (2012) bahwa tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Dengan demikian kalau wanita ingin melepaskan diri dari marginalisasi dan bisa berperan dalam kehidupan di masyarakat, wanita harus memiliki modal ekonomi dan modal pengetahuan. Kedua syarat tersebutlah yang menyebabkan tokoh-tokoh perempuan Buleleng tersebut di atas bisa eksis dan mempunyai peran yang cukup besar serta diperhitungkan di panggung politik Buleleng saat ini.

Apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan Buleleng tersebut saat ini merupakan suatu usaha perlawanan yang dilakukan wanita untuk menentang dominasi laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Dengan meminjam gagasan Scott (2010) perlawanan wanita itu mengikuti pola yang dilakukan oleh orang-orang yang kalah, terhadap pemenang, yakni laki-laki. Sudah saatnya kaum perempuan menuntut haknya kepada kaum laki-laki. Sudah saatnya pula wanita menuntut adanya kesetaraan gender. Jangan lagi dianggap bahwa wanita lebih lemah dan lebih rendah dari laki-laki. Wanita memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Wanita bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh laki-laki.

Harapan dan keinginan wanita untuk bisa disejajarkan dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan khususnya di bidang politik, sebenarnya sudah diakomodir oleh pemerintah bersama parlemen dengan mencantumkan keharusan adanya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen bagi setiap partai politik peserta pemilu yang akan mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan. Amanat yang tertuang dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (untuk Pemilu tahun 2004), serta pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (untuk Pemilu tahun 2009), kemudian dikenal dengan istilah “Kouta Perempuan 30 persen”. Diharapkan ini hanya merupakan tahap awal dari mulai diakuinya kemampuan kaum perempuan untuk berkiprah di panggung politik. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 (untuk Pemilu 2014) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (untuk Pemilu 2019) juga mengakomodir kuota perempuan untuk menjadi calon anggota legeslatif, dimana dalam kedua Undang-Undang tersebut dipersyaratkan masing-masing partai politik peserta Pemilu dalam menyerahkan nama-nama calon anggota legeslatif, harus menyertakan 30 persen perempuan dan setiap tiga nama minimal ada satu perempuan.

Kedepan diharapkan tidak hanya dibatasi “hanya” 30 persen, tetapi lebih besar lagi kuota bagi kaum perempuan untuk menjadi anggota parlemen. Bahkan nantinya keterwakilan perempuan di parlemen tidak terjadi karena diberikan

kuota, tetapi karena kemampuan wanita itu sendiri dalam bersaing dengan laki-laki untuk menduduki jabatan-jabatan politik yang penting seperti Presiden, Gubernur, Bupati, atau jabatan-jabatan politik lainnya. Dengan demikian, perempuan akan terlibat aktif dalam proses pembuatan keputusan, termasuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mengedepankan kesetaraan / kemitra sejajaran. Hal ini dimungkinkan mengingat sudah semakin majunya tingkat pendidikan perempuan. Dan pada akhirnya nanti, perjuangan kaum perempuan menuju kesetaraan gender, kesetaraan dan kesejajaran dengan laki-laki bisa terwujud.

Akan tetapi, untuk mewujudkan semua hal tersebut di atas, perlu adanya upaya yang optimal diantaranya dengan mengembangkan kesadaran politik perempuan, pengembangan budaya politik yang berkearifan, mengupayakan dukungan pengembangan budaya politik yang berkearifan dari berbagai jaringan sosial yang ada, dan membentuk serta memfungsikan organisasi-organisasi yang berbasis perempuan.

Upaya pengembangan kesadaran politik perempuan dan pengembangan budaya politik yang berkearifan dilakukan dengan memberikan ceramah-ceramah politik dalam berbagai kesempatan, baik melalui jaringan organisasi maupun non organisasi seperti misalnya melalui rembug-rembug politik, perbincangan dalam berbagai aktifitas ritual sosial yang dilakoninya. Melalui hal itu sekaligus juga akan dapat diketuk keterbukaan kaum perempuan untuk mengembangkan dan melibatkan diri dalam suatu organisasi berbasis perempuan, organisasi umum (untuk menyuarakan kesadaran kesetaraan), maupun membentuk dan ikut dalam organisasi politik. Dalam pengembangan budaya politik yang berkearifan tentu memerlukan perjuangan dengan melibatkan diri dalam berbagai jaringan sosial yang ada, dan hal itu menuntut kinerja secara terus menerus / berkelanjutan. Ingat perjuangan tidak pernah berhenti pada suatu titik, perjuangan menuju kearah yang lebih baik akan berlangsung sepanjang kehidupan umat manusia.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Eksistensi atau keberadaan kaum perempuan Buleleng di panggung politik lokal saat ini cukup diperhitungkan, meskipun secara kuantitas jumlah perempuan yang terlibat dalam politik di Buleleng masih sangat rendah. Duduknya 7 orang perempuan dalam kenggotaan DPRD Buleleng ditambah seorang perempuan Buleleng di DPRD Propinsi Bali, serta seorang perempuan yang memimpin Partai Demokrat Buleleng, serta tampilnya Tutik Kusumawardani sebagai calon Bupati Buleleng pada Pilkada tahun 2017, menjadi bukti dari kehandalan dan kemampuan wanita Buleleng untuk berkiprah di panggung politik. Kemampuan secara ekonomi karena keduanya adalah seorang pengusaha serta tingkat pendidikan yang cukup memadai menjadi salah satu modal bagi mereka untuk bisa tetap eksis di panggung politik Buleleng.
2. Upaya dan perjuangan yang dilakukan oleh kaum perempuan, ditambah lagi dengan angin segar yang diberikan oleh pemerintah lewat kuota 30 persen bagi keterwakilan perempuan di parlemen, diharapkan akan menjadi langkah awal bagi terwujudnya cita-cita kaum perempuan untuk bisa mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian tuntutan akan kesetaraan gender bukan hanya merupakan suatu usaha tanpa hasil. Ke depan diharapkan tidak ada lagi perbedaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Daftar Pustaka

- Adian,D.G. 2006, *Percik Pemikiran Kontemporer,Sebuah Pengantar Komprehensif*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Atmaja, Nengah Bawa, 2006, *Pemanfaatan Modal Budaya dan Modal Tubuh menjadi Modal Ekonomi Berbentuk Hiburan Seks Melalui Rangsangan Mata.*(Rancangan Buku).
- Baidan, N. 2009, *Tafsir bi Al-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bhasin,K. 2010, *Memahami Gender*, (Moh. Zaki Husein Penerjemah), Teplok Press, Yogyakarta.

- Bhasin, K. 2006, *Menggugat Patriarki Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan* (Nug Katjasungkana Penerjemah), Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Foucault, 2012, *Arkeologi Pengetahuan* (H.M. Mochtar Zoerni Penerjemah), Qalam, Yogyakarta.
- Gafar, Afan, 1991, Partisipasi Politik, *Prospektif*. No. 1, Vol.3.
- Hardiman, F.B. 2013, *Melampaui Positivisme dan Modernitas Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Katjasungkana, N., 2007, "Pandangan Islam tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Keluarga". Dalam D.S. Ashori, E.Kosasih dan F.Sarimaya ed. *Membicarakan Feminisme*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Mas'ood, Mochtar dan Colin Mac Andrew, 2008, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Murniati, N.P., 2004, *Getar Gender Buku Pertama (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM)*, Indonesiatara, Magelang.
- Raharjo, Yulfita, 1995, *Konsepsi Pembangunan Politik : Perspektif Gender, Makalah Seminar Nasional Peran Wanita Dalam Pembangunan Sosial Budaya Politik Bangsa*, Biro Wanita DPD Golkar Tk.I Propinsi DIY, Yogyakarta.
- Sandiasa, Gede, 2012. "Membangun Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Kebijakan Di Sektor Publik". Dalam WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 11 No. 3 April 2012. <https://adoc.tips/membangun-kepercayaan-publik-melalui-reformasi-kebijakan-di-.html>
- Scott, J.C., 2010, *Senjatanya Orang-orang Kalah*, (A.Rahman Zainuddin Sayogyo dan Joebhaar Penerjemah), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Siddiqui, K., 2012, *Menggugat "Tuhan yang Maskulin"*, (Arief Mafruhin Penerjemah), Paramadina, Jakarta.
- Strowasser, B.F., 2011, *Reinterpretasi Gender Wanita dalam Alquran, Hadis, dan Tafsir*, (H.M.Mochtar Zoerni Penerjemah), Pustaka Hidayah, Bandung.
- Sugiarta, Wayan, 2006, *Perlawanan Perempuan Sebagai Kaum Terpinggirkan dalam Keluarga dan Masyarakat*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Titib, I Made, 2008, *Citra Wanita dalam Kakawin Ramayana (Cermin Masyarakat Hindu tentang Wanita)*, Paramita, Surabaya